

BAB II

DESKRIPSI WILAYAH

A. SEJARAH KOTA YOGYAKARTA

Keberadaan Kota Yogyakarta tidak bisa lepas dari keberadaan Kasultanan Yogyakarta. Pangeran Mangkubumi yang memperjuangkan kedaulatan Kerajaan Mataram dari pengaruh Belanda, merupakan adik dari Sunan Paku Buwana II. Setelah melalui perjuangan yang panjang, pada hari Kamis Kliwon tanggal 29 Rabiulakhir 1680 atau bertepatan dengan 13 Februari 1755, Pangeran Mangkubumi yang telah bergelar Susuhunan Kabanaran menandatangani Perjanjian Giyanti atau sering disebut dengan *Palihan Nagari*. *Palihan Nagari* inilah yang menjadi titik awal keberadaan Kasultanan Yogyakarta.

Pada saat itulah Susuhunan Kabanaran kemudian bergelar Sri Sultan Hamengku Buwana Senopati Ing Ngalaga Abdurrahman Sayidin Panatagama Kalifatullah Inkgang Jumeneng Kaping I. Setelah Perjanjian Giyanti ini, Sri Sultan Hamengku Buwana *mesanggrah* di Ambarketawang sambil menunggu pembangunan fisik kraton.

Sebulan setelah ditandatanganinya Perjanjian Giyanti tepatnya hari Kamis Pon tanggal 29 Jumadilawal 1680 atau 13 Maret 1755, Sultan Hamengku Buwana I memproklamkan berdirinya Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dengan ibukota Ngayogyakarta dan memiliki separuh dari wilayah Kerajaan Mataram. Proklamasi ini terjadi di Desanngreh Ambarketawang dan dikenal dengan peristiwa Hadeging

Nagari Dalem Kasultanan Mataram – Ngayogyakarta. Pada hari Kamis Pon tanggal 3 sura 1681 atau bertepatan dengan tanggal 9 Oktober 1755, Sri Sultan Hamengku Buwana I memerintahkan untuk membangun Kraton Ngayogyakarta di Desa Pacethokan dalam Hutan Beringan yang pada awalnya bernama Garjitawati.

Pembangunan ibu kota Kasultanan Yogyakarta ini membutuhkan waktu satu tahun. Pada hari Kamis pahing tanggal 13 Sura 1682 bertepatan dengan 7 Oktober 1756, Sri Sultan Hamengku Buwana I beserta keluarganya pindah atau boyongan dari Pesanggrahan Ambarketawan masuk ke dalam Kraton Ngayogyakarta. Peristiwa perpindahan ini ditandai dengan candra sengkala memet Dwi Naga Rasa Tunggal berupa dua ekor naga yang kedua ekornya saling melilit dan diukirkan di atas banon/renteng kelir baturana Kagungan Dalem Regol Kemagangan dan Regol Gadhung Mlathi. Momentum kepindahan inilah yang dipakai sebagai dasar penentuan Hari Jadi Kota Yogyakarta karena mulai saat itu berbagai macam sarana dan bangunan pendukung untuk mewadahi aktivitas pemerintahan baik kegiatan sosial, politik, ekonomi, budaya maupun tempat tinggal mulai dibangun secara bertahap. Berdasarkan itu semua maka Hari Jadi Kota Yogyakarta ditentukan pada tanggal 7 Oktober 2009 dan dikuatkan dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2004

B. GAMBARAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

1. Gambaran Umum Kondisi Daerah Kota Yogyakarta

Meningkatnya jumlah penduduk di kota Yogyakarta karena faktor urbanisasi ataupun penambahan penduduk alami menyebabkan semakin ketatnya persaingan dalam berbagai aspek kehidupan. Sementara konsep pembangunan ekonomi yang tinggi ternyata tidak mampu memecahkan masalah sosial kemasyarakatan sementara itu urusan Ketenagakerjaan juga merupakan suatu masalah yang besar, sensitif dan kompleks.

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang sosial ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, diharapkan mampu untuk mengatasi masalah-masalah tersebut termaksud diatas, maka keluaran (ouput) kegiatan yang dihasilkan adalah mengatasi berbagai persoalan sosial, meningkatnya jumlah penganggur yang bekerja , meningkatnya jumlah penganggur yang memiliki ketrampilan, menurunnya angka perselisihan hubungan industrial. Maka didalam penanganannya dibutuhkan suatu proses yang berkesinambungan & berkelanjutan dari tahap survey, pengamatan, penentuan alternatif program sampai dengan penyusunan kebijaksanaan pelaksanaan.

Program yang disusun mendasarkan pada kondisi umum yang ada saat ini, yang akan diperbaiki melalui program pembangunan dibidang *Kemasyarakatan, Sosial, Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian*

2. Kondisi Sosial

a. Pendidikan.

Pendidikan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Untuk itu perlu didukung dengan penyediaan sarana fisik pendidikan maupun tenaga pengajar yang memadai. Pada tahun ajaran 2008/2009 di Kota Yogyakarta terdapat 49 perguruan tinggi swasta. Perguruan tinggi tersebut terdiri dari 6 universitas, 12 institut/sekolah tinggi dan 31 akademi. Jumlah dosen sebanyak 1.970 orang yang terdiri dari 284 orang dosen yayasan dan 1.686 orang dosen DPK. Jumlah mahasiswa yang terdaftar sebanyak 45.727 orang.

Pada tahun 2009/2010 di Kota Yogyakarta pada tingkat pendidikan pra sekolah dan sekolah menengah terdapat 67 perguruan tinggi swasta. Perguruan tinggi swasta tersebut terdiri dari 8 universitas, 24 institut/sekolah tinggi dan 35 akademi/politeknik. Jumlah dosen sebanyak 2.535 orang yang terdiri dari 333 orang dosen yayasan dan 2.202 orang dosen DPK. Jumlah mahasiswa yang terdaftar sebanyak 53.275.

Pada tahun 2010/2011 di Kota Yogyakarta menurut jenjang pendidikan pra sekolah sampai menengah terdapat 70 perguruan tinggi swasta. Perguruan tinggi tersebut terdiri dari 8 universitas, 25 institut/sekolah tinggi dan 37 akademi/politeknik. Jumlah dosen sebanyak 2.547 orang yang terdiri dari 343 orang dosen yayasan dan 2.204

orang dosen DPK. Jumlah mahasiswa yang terdaftar sebanyak 57.338 orang.

Pada tingkat pendidikan pra sekolah dan sekolah menengah di Kota Yogyakarta sebagian besar diselenggarakan oleh pihak swasta. Sedangkan untuk tingkat pendidikan dasar lebih banyak diselenggarakan oleh pemerintah.

b. Penduduk

Berdasarkan hasil sensus penduduk 2000, penduduk Kota Yogyakarta berjumlah 397.398 orang terdiri dari 194.530 orang (48,95 persen) laki-laki dan 202.868 orang (51,05 persen) perempuan. Jumlah penduduk berdasarkan hasil supas tahun 2005 sebanyak 435.326 orang. dengan demikian rata pertumbuhan penduduk periode tahun 2000-2005 sebanyak 1,9 persen. Berdasarkan hasil sensus penduduk 2010 jumlah penduduk tercatat 388.627 orang. komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin adalah 48,67 persen laki-laki dan 51,33 persen perempuan. Secara keseluruhan jumlah penduduk perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk laki-laki seperti tampak dari rasio jenis kelamin penduduk yang terkecil dari 100, dimana pada tahun 2010 sebesar 04 81. Agar lebih jelas bisa dilihat tabel 2.1 dibawah ini :

TABEL 2.1**Luas Wilayah, Penduduk menurut Jenis Kelamin dan Kepadatan Penduduk di Kota Yogyakarta 2009**

Kecamatan	Luas Wilayah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Total
Mantrijeron	2,61	18.640	19.294	14.534
Kraton	1,40	10.741	12.053	16.281
Mergangsan	2,31	17.526	18.755	15.706
Umbulharjo	8,12	39.681	40.631	9.891
Kotagede	3,07	27.380	16.496	10.693
Gondokusuman	3,99	11.138	28.984	14.126
Danurejan	1,10	5.651	11.831	20.881
Pakualaman	0,63	7.489	5.907	18.346
Gondomanan	1,12	9.632	8.700	14.454
Ngampilan	0,82	16.140	10.802	24.920
Wirobrajan	1,76	9.823	15.536	17.998
Gedongtengen	0,96	15.281	10.841	21.525
Jetis	1,70	13.521	15.712	18.231
Tegalrejo	2,91	20.600	21.158	14.350
Jumlah /Total	32,50	226,079	236.673	462.752

Sumber Data : BPS Kota Yogyakarta

Sementara pada tahun 2010 luas wilayah, penduduk menurut jenis

kelamin dan kepadatan penduduk di Kota Yogyakarta adalah lihat tabel 2.2 :

TABEL 2.2**Luas Wilayah, Penduduk menurut Jenis Kelamin dan Kepadatan Penduduk di Kota Yogyakarta 2010**

Kecamatan	Luas Wilayah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Total
Mantrijeron	2,61	15.190	16.077	11.980
Kraton	1,40	8.329	9.142	12.479
Mergangsan	2,31	14.375	14.917	12.681
Umbulharjo	8,12	37.114	39.629	9.451
Kotagede	3,07	15.516	15.636	10.147
Gondokusuman	3,99	21.915	23.378	11.352
Danurejan	1,10	9.020	9.322	16.675
Pakualaman	0,63	4.517	4.799	14.787
Gondomanan	1,12	6.095	6.934	11.633
Ngampilan	0,82	7.600	8.720	19.902
Wirobrajan	1,76	12.572	12.268	14.114
Gedongtengen	0,96	8.177	9.008	17.901
Jetis	1,70	11.451	12.003	13.796
Tegalrejo	2,91	17.266	17.657	12.001
Jumlah /Total	32,50	189.137	199.490	388.627

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta

Berdasarkan tabel diatas, kepadatan penduduk di Kota Yogyakarta pada tahun 2009 sampai tahun 2010 mengalami penurunan. Berdasarkan hasil sensus penduduk 2010 jumlah penduduk tahun 2010 tercatat 388.627 orang. Secara keseluruhan jumlah penduduk perempuan lebih

tinggi dibandingkan laki-laki seperti tampak dari rasio jenis kelamin penduduk.

c. Kondisi Geografis

Kota Yogyakarta terletak antara 110°24'19"-110°28'53" Bujur Timur dan antara 07°49'26"-07°15'24" Lintang Selatan, dengan luas sekitar 32,50 Km² atau 1,02 % dari luas wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jarak terjauh dari Utara ke Selatan kurang lebih 7,5 Km dan dari Barat ke Timur kurang lebih 5,6 Km.

Secara administratif Kota Yogyakarta terdiri dari 14 kecamatan dan 45 kelurahan dengan batas wilayah:

Sebelah Utara : Kabupaten Sleman

Sebelah Timur : Kabupaten Bantul dan Sleman

Sebelah Selatan : Kabupaten Bantul

Sebelah Barat : Kabupaten Bantul dan Sleman

d. Keadaan Alam

Secara garis besar Kota Yogyakarta merupakan dataran rendah dimana dari barat ke timur relatif datar dan dari utara ke selatan memiliki kemiringan ± 1 derajat, serta terdapat 3 (tiga) sungai yang melintas Kota Yogyakarta, yaitu :

a. Sungai Gajahwong yang mengalir di bagian timur kota

- b. Sungai Code di bagian tengah, dan
- c. sungai Winongo di bagian barat kota.

e. Luas Wilayah

Kota Yogyakarta memiliki luas wilayah tersempit dibandingkan dengan daerah tingkat II lainnya, yaitu 32,5 Km² yang berarti 1,025% dari luas wilayah Propinsi DIY. Dengan luas 3.250 hektar tersebut terbagi menjadi 14 Kecamatan, 45 Kelurahan, 617 RW, dan 2.531 RT.

C. PEMERINTAH DAERAH KOTA YOGYAKARTA

Adapun Visi Misi Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1. Visi

Terwujudnya Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan yang berkualitas, Pariwisata yang berbudaya, pertumbuhan dan pelayanan jasa yang prima, ramah lingkungan serta masyarakat madani yang dijiwai semangat Mangayu Hayuning Bawana.

2. Misi

- 1. Menjadikan dan mewujudkan lembaga pendidikan formal, non

pengetahuan dan teknologi serta kompetitif dalam rangka mengembangkan pendidikan yang berkualitas.

2. Menjadikan dan mewujudkan pariwisata , seni dan budaya sebagai unggulan daerah dalam rangka mengembangkan kota sebagai kota pariwisata yang berbudaya.
3. Menjadikan dan mewujudkan Kota Yogyakarta sebagai motor penggerak pertumbuhan dan pelayanan jasa yang prima untuk wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan .
4. Menjadikan dan mewujudkan masyarakat yang menyadari arti pentingnya kelestarian lingkungan yang dijiwai semangat ikut memiliki/handarbeni.
5. Menjadikan dan mewujudkan masyarakat demokrasi yang dijiwai oleh sikap kebangsaan Indonesia yang berketuhanan, berkemanusiaan yang adil dan beradab, berkerakyatan dan berkeadilan sosial dengan semangat persatuan dan kesatuan.

Dinas – Dinas yang terdapat dalam susunan organisasi Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut :²³

1. Dinas Pendidikan
2. Dinas Kesehatan
3. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

²³ Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 10 Tahun 2008

Selain LSM yang berdiri sendiri, dikenal pula dengan apa yang biasa disebut dengan jaringan LSM atau forum LSM, dimana LSM berkumpul bersama untuk mendiskusikan dan memperjuangkan isu-isu bersama. Hal ini banyak dikenal dalam berbagai nama seperti; forum, koalisi, aliansi, konsorsium, asosiasi, jaringan, solidaritas, dan lain-lain.

LSM didirikan jauh lebih daripada sekedar mendirikan organisasi bernama yayasan (atau jenis badan hukum lainnya) untuk mendapatkan proyek-proyek pemerintah atau keuntungan-keuntungan ekonomi lainnya. LSM didirikan dengan tujuan-tujuan yang lebih mulia yaitu perwujudan dari semangat *philantropi* (philantropist) yaitu “mencintai (sesama) umat manusia, dengan memberikan bantuan kepada yang membutuhkan”, dan *altruisme* (altruism) yaitu “menaruh perhatian dan kepedulian terhadap orang lain atau kemanusiaan”.

Terlepas dari nilai-nilai ideal yang terkejawantahkan dalam pilihan orientasi visi dan misi, serta ragam kegiatannya, ada empat karakter dasar sebagai ciri sosok LSM yang disepakati secara umum.

1. LSM itu lembaga non pemerintah, yang secara jelas membedakannya dari birokrasi. LSM didirikan secara hukum tidak mempunyai kaitan dengan organisasi negara atau pemerintahan.
2. LSM didirikan dan dijalankan berdasarkan azas kesukarelaan (voluntary). LSM didirikan dengan mengandung unsur-unsur kesukarelaan. Misalnya ada sejumlah orang (anak-anak itu

sekelompok banyak atau sekelompok kecil orang) yang mendirikan LSM dengan menyediakan waktunya secara sukarela (tanpa dibayar) untuk kepentingan organisasi tersebut. Kendati demikian, LSM dapat saja memiliki pegawai (eksekutif, staf program, staf pendukung, dan lainnya) yang dibayar dalam bentuk gaji/benefit/kompensasi lainnya atas tugas-tugas mereka. Tetapi tetap ada sejumlah orang yang menjadi pendiri atau pengurus (board of directors) yang tidak menerima gaji, melainkan hanya sekedar penggantian atas pengeluaran-pengeluaran yang mereka lakukan dalam pelaksanaan tugas-tugas mereka.

3. LSM menjalankan kegiatannya tidak untuk tujuan membagikan keuntungan (nirlaba), yang membedakannya dengan lembaga usaha. LSM tidak didirikan untuk mencari profit yang dibagi-bagikan bagi pendiri-pendiri atau pengurus-pengurusnya.
4. LSM dimaksudkan sebagai lembaga yang melayani masyarakat umum, bukan anggota atau para aktivisnya sendiri, sebagaimana dilakukan oleh koperasi atau asosiasi profesi. LSM didirikan untuk melayani kepentingan masyarakat, kaum miskin, kaum dhuafa, kaum yang tersingkirkan, kaum yang terlanggar hak-haknya sebagai warga masyarakat yang tidak mampu mengembangkan potensi yang ada pada dirinya atau menggapai hak-haknya secara penuh melalui tindakan-tindakan langsung atau tidak langsung.

LSM juga mempunyai kepeduliannya terhadap berbagai

kebijakan dan tindakan pemerintah yang merugikan masyarakat secara keseluruhan.

Sedangkan menurut sejarah perkembangannya, kegiatan-kegiatan LSM dapat dibagi atas;

1. LSM-LSM yang terlibat di dalam kegiatan-kegiatan amal sosial (charity), memberikan bantuan dan pertolongan kepada kaum miskin, mereka yang menderita karena berbagai bencana alam (gempa bumi, banjir, gunung meletus), perang dan sebagainya dengan memberikan keselamatan, dana dan material (bahan makanan, pakaian, obat-obatan) dan sebagainya. Inilah bentuk kegiatan LSM yang tertua. LSM-LSM yang bergerak dalam kegiatan ini banyak dikenal sebagai organisasi sosial dan sosial keagamaan dan organisasi-organisasi yang bergerak dalam kesejahteraan sosial.
2. LSM-LSM yang bergerak dalam kegiatan-kegiatan yang berorientasi kepada perubahan, perkembangan/pembangunan masyarakat (change and development) atau yang bergerak dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (community development, community empowerment). Berbeda dengan LSM karitatif, LSM-LSM ini bekerja untuk dan bersama masyarakat dalam satu periode waktu yang lebih panjang dengan maksud membantu masyarakat dalam masalah dirinya sendiri (belanja

people to help themselves). LSM-LSM ini memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam berbagai bidang atau sektor seperti air bersih dan sanitasi, teknologi tepat guna, kesehatan dan pendidikan, perkoperasian dan usaha bersama, usaha kecil dan kredit mikro, perumahan rakyat, pengembangan lingkungan hidup dan sumber daya alam, sektor informal, dan sebagainya. Di samping memberikan pelayanan, LSM ini juga memberikan pencerahan, penyadaran dan pelatihan, untuk membawa perubahan-perubahan dalam masyarakat. LSM-LSM ini dikenal dengan sebutan 'LSM Pembangunan' atau 'LSM developmentalis' (development NGO).

3. Karena kemiskinan, kesengsaraan, penderitaan yang dialami masyarakat tidak selalu bersumber dari dalam dirinya sendiri, tetapi bisa juga disebabkan oleh sesuatu yang dipaksakan dari luar, maka dalam perkembangan selanjutnya LSM-LSM tidak hanya bergerak dalam pelayanan masyarakat tetapi kemudian melakukan pembelaan (advokasi) terhadap kekuasaan dan pemerintah. Misalnya pembelaan terhadap pencemaran lingkungan hidup, kerusakan hutan, perlindungan hak azasi manusia (HAM), ketimpangan gender, diskriminasi rasial, dampak globalisasi dan ekonomi pasar bebas, hutang luar negeri, korupsi, kolusi dan nepotisme serta penyalahgunaan kekuasaan lainnya sampai kepada

penegakkan demokrasi, LSM-LSM ini dikenal dengan sebutan 'LSM advokasi' (advokacy NGO).

Berdasarkan peran dan fungsi LSM terhadap pemberantasan kemiskinan dan keterbelakangan, setidaknya telah terklasifikasi ke dalam empat spektrum pendekatan, yaitu :

1. Pendekatan kesejahteraan (welfare), yaitu memberikan pelayanan kepada kelompok-kelompok yang berpendapatan rendah, golongan lemah atau rakyat kecil. *Kedua*, Pendekatan pembangunan (developmentalis), dimana tekanan programnya adalah dukungan proyek-proyek untuk meningkatkan produktivitas dan kemandirian kaum miskin, sebagai upaya mengatasi keterbelakangan ekonomi, politik dan kultural.
2. Pendekatan pemberdayaan (empowerment), yaitu pendekatan yang melihat kemiskinan sebagai suatu proses politik.
3. Pendekatan transformatif, yaitu pendekatan yang berorientasi pada transformasi sosial secara mendasar melalui aksi pendampingan, pemberdayaan dan advokasi sebagai langkah efektif bagi penyadaran rakyat dan mengapresiasikannya sebagai kekuatan kolektif bagi perubahan melalui pengorganisasian masyarakat yang adil, demokratis dan beradab

E. PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT.

Kompleksitas permasalahan sosial yang berkembang dalam masyarakat menuntut upaya sadar dari setiap komponen masyarakat untuk memperbaharui dan mengelola sistem sosialnya serta menyelesaikan permasalahan sosialnya. Pembaharuan yang dimaksud adalah upaya pengembangan nilai-nilai yang melandasi struktur sosial suatu masyarakat yang dinami, stabil dan mengacu pada tujuan pencapaian kesejahteraan sosial. Sementara Pengelolaan Sosial adalah bagaimana menjadikan seluruh dinamika sosial dalam sistem masyarakat sebagai energi positif yang dapat dimanfaatkan bagi pengembangan masyarakat itu sendiri. Dan penyelesaian Masalah Sosial adalah intervensi sosial yang dilakukan secara sadar, inovatif dan terukut terhadap suatu permasalahan sosial sebagai langkah untuk menjadikan masalah tersebut normal kembali atau lebih baik lagi sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.

Perkembangan permasalahan sosial dalam masyarakat begitu kompleks sehingga diperlukan penanganan secara sungguh-sungguh, cepat, tepat dan berkelanjutan. Artinya untuk menyelesaikan permasalahan sosial dalam masyarakat tersebut diperlukan adanya motivator, stabilisator dan pendamping sosial yang hidup serta berkembang dalam masyarakat itu sendiri. Para motivator, stabilisator dan pendamping sosial tersebut perlu dibekali pengetahuan dan pemahaman lebih terhadap permasalahan sosial yang ada dalam lingkungannya, untuk selanjutnya berkinerja sesuai dengan

kultur dan tradisi lingkungannya itu sehingga mereka tidak terkesan eksklusif.

Atas dasar pertimbangan itulah pemerintah melalui Departemen Sosial RI sejak tahun 1979 telah melatih masyarakat sebagai motivator, stabilisator dan pendamping sosial dalam masyarakat yang disebut dengan nama Pekerja Sosial Masyarakat (PSM). Para PSM ini merupakan volunteer dari masyarakat yang berdomisili di desa-desa/kelurahan seluruh Indonesia dan sebagai pengarah dalam operasionalnya adalah seorang Pekerja Sosial Kecamatan (PSK) yang merupakan pegawai negeri. Sekarang PSKnya sudah dibubarkan, sementara PSM nya masih ada di seluruh Nusantara. Bahwa diperlukan manifestasi Semangat Sosial dalam mewujudkan kesejahteraan sosial melalui Forum Komunikasi yang berfungsi sebagai wahana dan sarana komunikasi, konsultasi dan koordinasi berbagai kegiatan PSM yang dikelola secara mandiri, tumbuh dan berkarya dari, oleh dan untuk Pekerja Sosial Masyarakat itu sendiri. Untuk itulah para PSM dengan penuh kesadaran, atas rasa tanggung jawab, dengan semangat Kesetiakawanan Sosial Nasional, bermufakat untuk menghimpun diri dalam suatu wadah yang diberi nama Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat disingkat FKPSM. FKPSM adalah wadah berhimpun para PSM se-Indonesia di bawah binaan Departemen Sosial RI.

A. Pengertian Pekerja Sosial Masyarakat

Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) adalah warga masyarakat yang atas rasa kesadaran dan tanggung jawab sosial serta didorong oleh rasa kebersamaan kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial secara sukarela mengabdikan diri di bidang kesejahteraan sosial.

1. Tujuan

FKPSM bertujuan meningkatkan kualitas Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial, mewujudkan masyarakat adil dan makmur menuju persatuan bangsa.

2. Fungsi

- a. Sebagai wadah kaderisasi para PSM se-Indonesia
- b. Wahana komunikasi, konsultasi dan koordinasi berbagai kegiatan PSM.
- c. Sarana untuk mewujudkan persatuan dan alat perjuangan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.
- d. Sebagai sarana pembinaan dan pengembangan sikap mental para PSM dalam rangka kehidupan yang damai dan sejahtera dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- e. Sebagai stabilisator, dinamisator, motivator, fasilitator dan integrator masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial

3. Peran

- a. Sebagai Sumber Daya Sosial yang ikut berperan aktif dalam proses pembangunan Kesejahteraan Sosial
- b. Sebagai Media Kaderisasi para PSM.
- c. Sebagai Mitra Konsultasi berbagai permasalahan kesejahteraan sosial secara partisipatif, setara, anti kekerasan, berbudaya dan berkemajuan.
- d. Sebagai pengembang jaring kemitraan dengan berbagai pihak dalam mewujudkan cita-cita bersama pada keadilan dan kesejahteraan sosial secara menyeluruh.

4. Usaha

- a. Menanamkan dan menumbuh-kembangkan semangat guna terwujudnya persatuan bangsa.
- b. Memantapkan peran PSM dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
- c. Melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial dalam rangka pengembangan ekonomi nasional.
- d. Membina dan meningkatkan kualitas Sumber Daya PSM tentang pemahaman Hak Asasi Manusia, Lingkungan Hidup, Kependudukan, Keluarga Berencana, Kesehatan dan Wawasan Kebangsaan guna mewujudkan profesionalisme para PSM

- e. Berpartisipasi aktif, konstruktif, loyal dalam setiap proses pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Bencana Alam.
- f. Meningkatkan kemitraan dengan pemerintah, organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat, baik dalam maupun luar negeri atas dasar prinsip persamaan hak dan kesejahteraan sosial.

B. Kemitraan

FKPSM adalah organisasi sosial kemasyarakatan yang bersifat terbuka dan bersedia bermitra dengan lembaga, perusahaan atau perorangan baik dari dalam maupun luar negeri dalam bidang pembangunan kesejahteraan sosial dengan prinsip kemanfaatan sebesar-besarnya bagi masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Keputusan Walikota Yogyakarta No.500/KEP/2010 pada tanggal 1 September 2010 tentang Pembentukan Pengurus Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat (FK PSM Kota Yogyakarta Masa Bakti 2009-2014). Adapun Susunan Personalia Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat (FK PSM Kota Yogyakarta Masa Bakti 2009-2014) adalah tabel 2.3.

TABEL 2.3
Personalia Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat (FK PSM Kota
Yogyakarta Masa Bakti 2009-2014

No.	Jabatan Dalam FKPSM	Jabatan Dalam Dinas / Unsur Dari	Keterangan
i.	Pembina Utama	Walikota Yogyakarta Wakil Walikota Yogyakarta	
ii.	Dewan Penasehat	PSM Kecamatan Pakualaman PSM Kecamatan TegalRejo PSM Kecamatan Pakualaman PSM Kraton	Haryo Prayitno Wasis Siswanto E.Sri Sayekti
iii.	Ketua Wakil Ketua I Wakil Ketua II Wakil Ketua III	PSM Kecamatan TegalRejo PSM Kecamatan Jetis PSM Kecamatan Mantrijeron PSM Kecamatan Wirobrajan	Kasmad Totok Bidiarto Sri Kuswarin SZ. Sardjana Ramelan
iv.	Sekretaris Sekretaris	PSM Kecamatan Kraton PSM Kecamatan Umbulharjo	Arief Adrianto Rr.. Eni Setyaningsih
v.	Bendahara Bendahara I	PSM Kecamatan Wirobrajan PSM Kecamatan Wirobrajan	Lm. Pudjiarti AgustinSudaryanti
vi.	Kordinator Bidang Litbang, Diklat dan Kaderisasi Anggota	PSM Kecamatan Mantrijeron PSM Kecamatan TegalRejo PSM Kecamatan TegalRejo PSM Kecamatan Wirobrajan PSM Kecamatan Kota gede PSM KecamatanGondokusuman PSM Kecamatan Mantrijeron	Drs. P. Suwarsono Joko Susanto Tri Waluyo, BSW Rr. Wiwik Ngesti, S.Sos Heny Pusputasari Vico Handayani
vii.	Koordinasi Bidang Kemitraan dan Kewirausahaan Anggota	PSM Kecamatan TegalRejo PSM Kecamatan Gedongtengen PSM Kecamatan Kraton PSM KecamatanGondongkusuman PSM Kecamatan Kraton PSM Kecamatan TegalRejo PSM Kecamatan Danurejan	B.Monda Saragi, SH Yati Yupriyanto H.Abdul Harrists, BA Indiyah Widarwanti Sigit Agung Prasetyo Drs. Mawardi M G.Irianto
viii.	Koordinator Bidang Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial Anggota	PSM Kecamatan Kota gede PSM Kecamatan Jetis PSM KecamatanGondomanan PSM Kecamatan Umbulharjo PSM Kecamatan Gondomanan PSM Kecamatan Mergangsan PSM Kecamatan Jetis	Murti Kusumo Slamet Suharti Antarian JM Retno Argyanti, SH K.A. Wibowo Dwiyanti Sarjiyo Aryanur Am

Sumber : SK No.500/KEP/2010 tentang pembentukan FK PSM Kota Yogyakarta

Berdasarkan Tabel 2.3 diatas, ditetapkan bahwa Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kegiatan koordinasi, informasi dan edukasi bagi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)
- b. Meningkatkan mutu Pelayanan dan Peranan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dalam Menanggulangi masalah-masalah kesejahteraan masyarakat
- c. Memantapkan dan melembagakan usaha kesejahteraan sosial diwilayah, baik oleh Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) maupun melalui kerja sama dengan pilar-pilar partisipan lainnya.

Ada dua definisi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) adalah sebagai berikut:²⁴

- a. warga masyarakat yang atas dasar rasa kesadaran dan tanggung jawab sosial serta didorong oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial secara sukarela mengabdikan pada pembangunan kesejahteraan sosial
- b. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) adalah warga masyarakat yang peduli, memiliki wawasan, komitmen terhadap kesejahteraan sosial, dan telah mengikuti pendidikan atau pelatihan kesejahteraan sosial.

²⁴ D. A. J. Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat No. 02/KSM/PSM/07

F. ANAK JALANAN

Anak jalanan adalah semua orang yang mencari penghidupan dijalanan (persimpangan jalan atau tempat-tempat yang ada dijalanan) baik itu sebagai pengemis, pengamen, tukang lap motor/mobil atau bahkan yang menjadi pedangan asongan tanpa tahu dan memperhatikan usia mereka. namun disini yang termasuk anak jalanan adalah sesuai dengan peristilahan bahwa yang maksud anak jalanan adalah yang dibatasi oleh usia yaitu dari usia 6-21 tahun atau belum menikah.

Kondisi yang memaksa anak untuk berkeliaran atau mencari nafkah dijalanan dengan menghabiskan sebagian waktunya merupakan penyimpangan fungsi sosial anak. Penyimpangan lainnya yang juga terjadi terhadap hak-hak anak adalah terabaikannya pelayanan kesehatan, pendidikan, bermain, hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak (makanan, air bersih, dan tempat untuk hidup), mempelajari kebudayaan, kebebasan dan eksploitasi dan banyak penyimpangan lainnya.

Berbagai macam alasan anak jalanan mengapa mereka turun dan hidup dijalanan. Baik itu karena tuntutan ekonomi keluarga sehingga mereka terpaksa harus menjadi pengemis atau pengamen dijalanan. Ingin kebebasan dalam berekspresi, serta faktor dari keluarga yang kurang harmonis ataupun kurang perhatian dari keluarga, dimana hal ini menyebabkan anak-anak

Adapun tabel 2.4 Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) menurut jenis kelamin di Kota Yogyakarta tahun 2010 adalah sebagai berikut :

TABEL 2.4
DATA PMKS MENURUT JENIS KELAMIN DI KOTA YOGYAKARTA
2010

No	Jenis PMKS	Laki-Laki		Perempuan		Jumlah
		jumlah	Persen%	Jumlah	Persen%	
1.	Anak Balita Terlantar	33	53.23	29	46.77	62
2.	Anak Terlantar	477	58.46	399	41.54	816
3.	Anak Nakal	41	85.42	7	14.58	48
4.	Anak Jalanan	105	73.94	37	26.06	142
5.	Korban Tindak K	86	19.20	362	80.80	448
6.	Lanjut Usia terlantar	485	24.94	1.460	75.06	1.945
7.	Penyandang Cacat	1.866	54.59	1.552	45.41	3.418
8.	Tuna Susila	2	1.49	132	98.51	134
9.	Pengemis	29	28.43	73	71.57	102
10.	Gelandangan	9	52.94	8	47.06	17
11.	Korban Penyalahgunaan Napza	268	95.37	13	4.63	281
12.	Pekerja Migran Bermasalah	41	66.13	21	33.87	62
13.	Bekas Warga Binaan LK	721	66.13	43	5.63	764

Sumber : Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta

Berdasarkan tabel diatas jumlah anak jalanan berjumlah 142 ditahun 2010. Jumlah anak jalanan menurut jenis kelamin laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan. Jenis kelamin laki-laki sebanyak 105 anak di 85.42 persen. Sedangkan jenis kelamin perempuan hanya 37 anak di 26.06 persen. Sementara jumlah anak jalanan di Kota Yogyakarta Tahun 2005 –

TABEL 1.4
JUMLAH ANAK JALANAN DI KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2005 – 2010

TAHUN	JUMLAH ANAK JALANAN
2005	330
2006	500
2007	177
2008	388
2009	161
2010	142

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta

Berdasarkan data diatas, dari tahun 2005-2006 jumlah anak jalanan mengalami peningkatan dari 330 menjadi 500 anak. Di tahun 2008 jumlah anak jalanan menjadi 388 anak, kemudian di tahun 2009-2010 jumlah anak jalanan mengalami penurunan dari 161 menjadi 142 anak